

**ANALISIS STAKEHOLDER PADA PELAKSANAAN PROGRAM PADAT  
KARYA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KELURAHAN  
MEDOKAN SEMAMPIR**

**Grace Febry Permata Putri**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[tataputriid@gmail.com](mailto:tataputriid@gmail.com);

**Hasan Ismail**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[hasanismail@untag-sby.ac.id](mailto:hasanismail@untag-sby.ac.id);

**ABSTRAK**

Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program padat karya yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) triplehelix untuk mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir, Kota Surabaya. Dalam penerapan program padat karya, sasaran yang akan dijadikan aktualisasi dari program ini adalah Gamis (Keluarga Miskin) dengan kriteria yang sudah ditentukan melalui hasil kuisioner. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dari program padat karya Kota Surabaya sangat bergantung pada pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersangkutan. Namun, setiap pemangku kepentingan memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat atas terlaksananya program padat karya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung dari aktor kepentingan yang mempengaruhi program padat karya dalam mengentaskan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan rekapitulasi. Kuantitas narasumber yang dijadikan pedoman sebanyak 3 orang dari perwakilan setiap stakeholder dalam triplehelix yang mempengaruhi keberhasilan program padat karya untuk mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir. Berdasarkan hasil penelitian, program padat karya dapat mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir dengan target 355 KK menjadi 60 KK. Semua Keluarga Miskin di Kelurahan Medokan Semampir 100% sudah bekerja dengan presentase 85% berpenghasilan diatas 4 juta rupiah dan 15% berpenghasilan di bawah 4 juta rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh peran stakeholder model triple helix yaitu dari pemerintah meliputi Pemerintah Kota Surabaya, Kelurahan Medokan Semampir, dan Dinas Sosial Kota Surabaya. Sedangkan stakeholder dari masyarakat meliputi Keluarga miskin (Gamis). Adapun juga stakeholder dari pihak privat meliputi Cipta karya, dinas koperasi dan perdagangan Kota Surabaya, serta CV Kemilau Grafika. Oleh sebab itu, peran stakeholder dalam program padat karya dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir sangat penting dan

sifatnya saling berkesinambungan.

**Kata kunci:** *Stakeholder, Triplehelix, Kemiskinan, Gamis, Padat Karya.*

### **ABSTRACT**

The Surabaya City Government launched a labor-intensive program in collaboration with triplehelix stakeholders to alleviate poverty in Medokan Semampir Village, Surabaya City. In implementing the labor-intensive program, the targets that will be used as actualization of this program are Gamis (Poor Families) with criteria that have been determined through the results of the questionnaire. Success in achieving the objectives of the Surabaya City labor-intensive program is very dependent on the stakeholders concerned. However, each stakeholder has several supporting and inhibiting factors for the implementation of this labor-intensive program. This research aims to analyze the inhibiting and supporting factors from interested actors that influence labor-intensive programs in alleviating poverty. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, documentation and recapitulation. The quantity of resource persons used as a guide was 3 people from representatives of each stakeholder in the triplehelix which influenced the success of the labor-intensive program to alleviate poverty in Medokan Semampir Village. Based on research results, the labor-intensive program can alleviate poverty in Medokan Semampir Village with a target of 355 families to 60 families. 100% of all poor families in Medokan Semampir Subdistrict are working with a percentage of 85% earning above 4 million rupiah and 15% earning below 4 million rupiah. This is influenced by the role of stakeholders in the triple helix model, namely from the government including the Surabaya City Government, Medokan Semampir Village, and the Surabaya City Social Service. Meanwhile, stakeholders from the community include poor families (Gamis). There are also stakeholders from the private sector including Cipta Karya, the Surabaya City Cooperatives and Trade Department, and CV Kemilau Graphics. Therefore, the role of stakeholders in the labor-intensive program in alleviating poverty in Medokan Semampir Subdistrict is very important and mutually sustainable.

**Keywords:** *Stakeholders, Triplehelix, Poverty, Gamis, Labor Intensive.*

### **A. PENDAHULUAN**

Kesenjangan ekonomi merupakan suatu hal yang menjadi problematika pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional maupun daerah. Dilansir dari (kemenkeu.go.id, 2023) bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih mencapai angka 9,36 persen per bulan Maret 2023. Hal tersebut menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai keluarga miskin masih cukup banyak. Menurut (Utami et al., 2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan sangat mendasar, karena kemiskinan merupakan masalah yang paling mendasar dalam kehidupan menyangkut pemenuhan kebutuhan dan masalah global karena masalah yang dialami oleh kebanyakan

negara di dunia. Dalam proses Pembangunan Nasional dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya tindakan untuk menangani dan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Isu-isu mengenai kemiskinan merupakan fokus pembangunan setiap negara di dunia. Perhatian terhadap kemiskinan bahkan menjadi isu global yang terungkap secara tegas dalam sasaran-sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals, MDGs).



Gambar: Perkembangan Kemiskinan di Jawa Timur, Maret 2013 - Maret 2023

Sumber: BPS Jatim

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan (Ferezagia, 2018). Kegiatan Pembangunan nasional harus sejalan dengan penguatan aktivitas ekonomi, penurunan angka pengangguran dengan memberikan lapangan kerja baru, maupun pengendalian tingkat inflasi. Sedangkan tingkat kemiskinan di Kota Surabaya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (surabaya.go.id, 2022) masih mencapai angka 10,35 persen per bulan Maret 2023. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Surabaya dibawah kepemimpinan Walikota Eri Cahyadi, meluncurkan program kerja yang diberi nama dengan Program Padat Karya. Program Padat Karya merupakan program kerja yang berkolaborasi dengan aktor-aktor kepentingan dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan penduduk Kota Surabaya dengan cara memberikan lapangan kerja baru oleh instansi atau lembaga swasta yang menjadi mitra dari setiap kelurahan yang ada di Kota Surabaya.

Pada umumnya, kemiskinan merupakan suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan hidup yang layak dan bermartabat. Badan Pusat Statistik dalam mengategorikan kemiskinan melalui pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Kondisi kemiskinan ini merupakan ketidakmampuan seorang individu maupun kelompok dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan yang diperoleh dari data hasil survey (sampel) yang dikategorikan dari desil 1-5. Penduduk dengan kategori desil 1,2,dan 3 dinyatakan sebagai Keluarga Miskin (Gamis). Menurut Suparlan (2000), mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang

diderita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja.

Target dari program padat karya adalah penduduk Kota Surabaya yang dikategorikan sebagai Gamis (Keluarga Miskin) dengan proses seleksi yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya melalui seleksi dari jenjang RT hingga Dinas Sosial yang dibuktikan dengan kegiatan survey langsung ke rumah warga yang mengajukan sebagai Keluarga Miskin. Di suatu kondisi, masyarakat yang sudah tercatat sebagai Gamis mulai nyaman dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat mulai bermalas-malasan untuk mencari kerja serta rendahnya kreatifitas masyarakat untuk membuka UMKM dengan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengambil tindakan untuk mengentaskan kemiskinan yang berlarut-larut dengan metode yang berbeda masih dengan target yang sama melalui program padat karya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Padat Karya pada Urusan Pemerintahan di Bidang Perkerjaan Umum yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2022 bahwasannya program padat karya diperuntukkan bagi Keluarga Miskin dengan memberikan peluang kerja baru atas rekomendasi Kelurahan sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi atau lembaga yang bekerja sama dengan kelurahan tersebut. Untuk mencapai target yang ditentukan dalam program padat karya, maka harus ada campur tangan antara aktor-aktor yang bersangkutan dalam triplehelix. Sumber daya manusia masyarakat juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pengentasan kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena kurang adanya kreatifitas dan inovasi dari masyarakat untuk menemukan lapangan kerja baru.

Secara teoritis, dalam proses pengentasan kemiskinan perlu adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat diimbangi dengan adanya kebijakan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka Keluarga Miskin yang ada di Kelurahan Medokan Semampir. Hal ini bisa diwujudkan melalui proses optimalisasi produktivitas masyarakat dengan menjalin kerja sama antara pihak kelurahan dengan organisasi swasta ataupun negeri yang berorientasi pada profit. Istilah stakeholder adalah seorang pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam pelaksanaan suatu program. Keberhasilan dan kegagalan suatu program dipengaruhi oleh kerja sama antara stakeholder yang satu dengan yang lain. Penelitian yang dilakukan oleh (Puspaningtyas, 2021) yang berjudul Peran Stakeholder dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid 19 Pada Program Puspa Aman di Kabupaten Gianyar menjelaskan bahwa seluruh unsur yang terlibat (stakeholder), seperti Pemerintah, Masyarakat dan Organisasi swasta memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program. Dalam penelitian (Dwi Ariyanto & Marom Departemen Administrasi Publik, n.d.) dengan judul Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Pilah Sampah di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang menjelaskan bahwa masyarakat, Bank sampah

dan KSM, Pemerintah Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Tugu dan Kelurahan Mangkang Kulon merupakan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program pilah sampah. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, belum dijelaskan secara jelas tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dari keberlangsungan program. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menelisik faktor-faktor yang mempengaruhi peran stakeholder dalam implementasi program. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam proses realisasi Program Padat Karya dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan proses mengatur dan menentukan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik ditentukan oleh Pemerintah atas kesepakatan bersama melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dari setiap golongan. Sedangkan publik adalah semua yang berkaitan dengan masyarakat. Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki outcomes di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan (Handoyo. E, 2012). Dalam proses pelaksanaan kebijakan publik pasti akan menghasilkan program-program yang ditujukan bagi target dengan kelompok tertentu. Kebijakan publik dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi direalisasikan pada program padat karya di lingkup pemerintah Kota Surabaya. Kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.

### **Implementasi**

Implementasi merupakan proses melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah. Menurut (Eko Handoyo, 2012) Implementasi Kebijakan merupakan kegiatan untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Hill and Hupe 2002). Implementasi berperan sebagai penggerak atau pengendali dari pencapaian hasil tujuan. Dengan adanya implementator, tujuan dari adanya kebijakan publik dalam mengelola dan mengatur masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat direalisasikan pada program-program pemerintah. Dalam proses pengimplementasian kebijakan publik di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program padat karya yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan bagi Keluarga Miskin di Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya.

### **Padat Karya**

Merupakan program pengentasan kemiskinan yang dirintis oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak awal Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Padat Karya pada

Urusan Pemerintahan di Bidang Perkerjaan Umum yang ditetapkan pada tanggal 18 November 2022. Padat karya berfungsi dalam menyediakan lapangan kerja baru bagi warga miskin yang belum memiliki pekerjaan di usia produktif. Hal ini mengacu pada Misi Walikota Eri Cahyadi dalam mewujudkan perekonomian yang inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuka lapangan kerja baru.

Program Padat Karya merupakan program pengentasan kemiskinan yang berbasis perluasan lapangan kerja bagi warga Gamis (Keluarga Miskin) di Kota Surabaya. Program Padat Karya merupakan program kerja sama antara pemerintah dengan organisasi swasta maupun birokrasi untuk menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau masyarakat yang memiliki pekerjaan namun dengan upah gaji masih pada taraf di bawah UMR. Program padat karya memfokuskan pada tenaga kerja manusia yang berlatar belakang dari skill dan juga Sumber Daya Manusia (SDM). Program Padat Karya juga memprioritaskan para masyarakat yang belum memiliki keterampilan dengan cara mengikuti pelatihan. Program padat karya Kota Surabaya telah resmi diberlakukan pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan pada Perwali Kota Surabaya nomor 119 Tahun 2022.

### **Stakeholder**

Istilah stakeholder merupakan aktor-aktor yang sifatnya saling berkaitan antara satu sama lain dengan mengemban kepentingan baik itu tugas maupun perannya masing-masing dalam proses pelaksanaan program maupun kebijakan. Menurut (Hitt et al, 2013) Stakeholder adalah individu, kelompok, dan organisasi yang mempengaruhi Perusahaan. Stakeholder sangat berperan dalam keberhasilan pelaksanaan program karena sifatnya berhubungan satu sama lain. Apabila ada salah satu dari stakeholder yang lalai ataupun tidak kompeten maka akan semakin jauh pula tujuan program Padat Karya yang hendak dicapai. Analisis stakeholder sangat berpengaruh pada proses pencapaian tujuan dalam pengentasan kemiskinan. Untuk mengetahui keterlibatan stakeholder dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Medokan Semampir maka diperlukan adanya analisis peran stakeholder oleh R. Nugroho, 2017. Teori Ini dapat digunakan untuk melihat apa saja peran dan hambatan stakeholder melalui pengklasifikasian sebagai berikut; policy creator, coordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Dalam proses pelaksanaan program padat karya keterlibatan stakeholder sangat diperlukan untuk mempengaruhi keberhasilan tujuan program padat karya dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. stakeholder yang bersangkutan dengan pelaksanaan program padat karya adalah (1)Unsur pemerintah meliputi Pemerintah Kota Surabaya, Kelurahan Medokan Semampir, Dinas Sosial Kota Surabaya; (2)Unsur Masyarakat meliputi Keluarga Miskin dan Keluarga Pramiskin; (3) Organisasi Swasta meliputi Cipta Karya, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya, dan CV Kemilau Grafika.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (2012:9) penelitian kualitatif adalah didasarkan pada

filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah. Di sini posisi peneliti sebagai instrument kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam proses pengumpulan datanya diperoleh dari observasi lingkungan dengan cara wawancara kepada narasumber yang bersangkutan. Focus dari penelitian artikel ini adalah stakeholder triplehelix yang meliputi pemerintah, organisasi privat, akademisi, masyarakat dan juga media. Data primer yang akan dijadikan sumber penelitian dalam artikel ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang dijadikan sebagai pendukung dari adanya penelitian ini merupakan literature jurnal terdahulu yang dipublikasikan pada media massa.

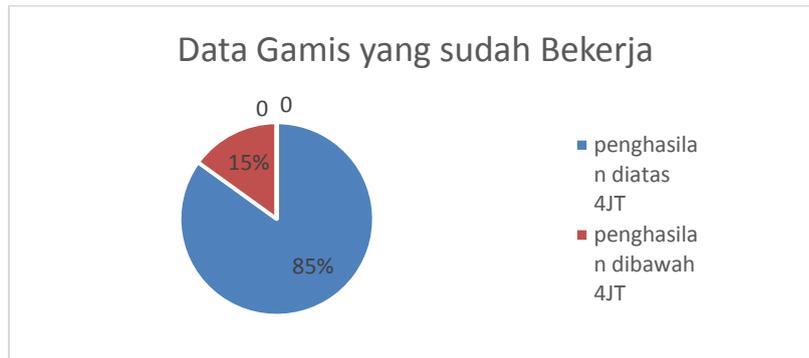
Objek yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Penelitian mengarah pada analisis stakeholder yang meliputi Dinas Sosial Kota Surabaya, Dinas Cipta Karya, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya, Kelurahan Medokan Semampir, dan masyarakat yang dijadikan sasaran yaitu Keluarga Miskin (Gamis). Tahap awal yang akan dilakukan adalah melakukan kunjungan kepada para stakeholder, tahap selanjutnya adalah melihat efektifitas kinerja dari program padat karya yang ada di Kelurahan Medokan Semampir setelah kegiatan berjalan mulai dari awal Tahun 2023. Proses analisis dilakukan melalui tahap identifikasi data, reduksi data, abstraksi data, interpretasi data dan pengecekan keabsahan data (Creswell, 2013). Metode analisis stakeholder ini yang akan dijadikan sebagai acuan dasar dalam mengembangkan pola kolaborasi antara para pemangku kepentingan untuk mengetahui keberhasilan program dalam proses pencapaian tujuan dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan berdasarkan proposisi teoritis yang sesuai dengan teori yang digunakan (K.Yin, 2003). Metode yang akan digunakan penulis untuk menganalisis stakeholder adalah Teori Analisis Stakeholder menurut (R. Nugroho, 2017) untuk menentukan peran setiap stakeholder yang bersangkutan pada pelaksanaan program padat karya beserta dengan hubungannya antar satu dengan yang lain.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada proses pelaksanaan program padat karya di Kelurahan Medokan Semampir sudah berjalan dengan lancar. Bahkan antusias dari masyarakat untuk mengikuti program tersebut sangat tinggi. Namun, masih ada hambatan yang menjadi faktor penghalang terlaksananya program padat karya tersebut. Dengan adanya hambatan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya Kelurahan Medokan Semampir masih berusaha dalam mencari alternatif solusi yang terbaik. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan perwakilan staff kelurahan yang berasal dari Dinas Sosial Kota Surabaya “sejauh ini program berjalan dengan baik mbak, namun masih ada hambatan yang menjadikan kendala dalam proses pengimplementasian program padat karya. Hal ini dipengaruhi karena adanya tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai karena latar belakang pendidikan yang relative rendah bagi masyarakat Kelurahan

Medokan Semampir, sedangkan Lembaga yang bekerja sama atau mitra yang menyediakan lapangan kerja harus memiliki kualifikasi. Hal ini menyebabkan perbedaan antara harapan dengan kenyataan bahwa SDM dari masyarakat Gamis belum bisa memenuhi kriteria dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh mitra”.

Menurut Kepala Seksi Kesra Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya bahwa 100% Keluarga Miskin di Kelurahan Medokan Semampir sudah bekerja dengan target 355 Kartu Keluarga. 85% diantaranya memiliki penghasilan diatas 4 juta rupiah, dan Adapun juga 15% warga miskin yang berpenghasilan dibawah 4 juta. Berikut diagram data warga yang sudah bekerja dengan presentase sebesar 100%.



Sumber data dari Kelurahan Medokan Semampir

Menurut salah satu perwakilan mitra dari Cipta karya menjelaskan bahwasannya para Lembaga mampu memberikan bantuna kepada warga miskin yang masih belum memiliki keterampilan yang memadai, maka dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat kelurahan medokan semampir dapat membantu terlaksananya program padat karya. Sedangkan Menurut perwakilan Keluarga Miskin, mengatakan bahwa program padat karya sangat membantu beliau untuk membuka maupun mencari lapangan kerja baru. Oleh sebab itu, Program padat karya memberikan pengalaman dan prospek kerja yang baik bagi masyarakat khususnya keluarga miskin (Gamis).

Data relalisasi program padat karya yang ada di Kelurahan Medokan Semampir.



Sumber data dari Kelurahan Medokan Semampir

Berdasarkan data tersebut, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dalam kategori keluarga miskin dari data bulan Januari-Oktober Tahun 2023 mengalami penurunan dari 1318 Jiwa dengan jumlah 399 Kartu Keluarga menjadi 322 Kartu Keluarga dengan jumlah 95 Kartu Keluarga per awal bulan Oktober 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Program Padat Karya mampu untuk mengentaskan kemiskinan bagi Masyarakat Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya. berikut rincian kegiatan yang telah dilakukan dalam proses pelaksanaan Program Padat Karya;

No	Bentuk Kegiatan	Mitra	Target
1	Servis HP	Kelurahan Medokan Semampir	2 Orang
2	Jahit Seragam, hijab, vermak	Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya	4 Orang
3	Produksi Paving	Dinas Cipta Karya	2 Orang
4	Rombong Bakso	Kelurahan Medokan Semampir	1 Orang
5	Cuci Motor	Kelurahan Medokan Semampir	2 Orang
6	Batik Tulis	Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya	2 Orang

Data hasil Olahan dari Penulis

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka perlu adanya analisis stakeholder yang berguna untuk melihat peran yang sedang dilakukan oleh para stakeholder dan proses pengklasifikasian dalam kategori; Policy Creator, Koordinator, Fasilitator, Implementor dan Akselerator (Nugroho, 2017).

#### **Identifikasi Stakeholder**

Merupakan proses pembagian tugas sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain. Dalam proses pengidentifikasian Program Padat Karya dapat dilihat dari tiga stakeholder yang berkepentingan, diantaranya adalah pemerintah (government), masyarakat (community), dan juga organisasi swasta (business). Ketiga stakeholders tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda, sehingga pengaruh yang ditimbulkan juga akan mengalami perbedaan.

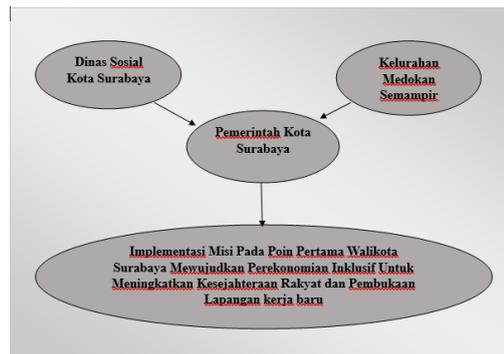
No	Unsur	Stakeholder
1	Pemerintah (Government)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kota Surabaya</li> <li>2. Kelurahan Medokan Semampir</li> <li>3. Dinas Sosial Kota Surabaya</li> </ol>
2	Masyarakat (Community)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gamis (Keluarga Miskin)</li> <li>2. Pramis (Keluarga Pra-Miskin)</li> </ol>
3	Organisasi Swasta (Bussines)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cipta karya</li> <li>2. Dinas koperasi</li> <li>3. CV Kemilau</li> </ol>

Data hasil olahan penulis

Berdasarkan tabel diatas jumlah stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Medokan Semampir sebanyak 7 stakeholder. Dalam pelaksanaan Program Padat Karya Kota Surabaya, proses pelaksanaannya memiliki peran yang tidak sama anantara satu dengan yang lain, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut; Policy Creator, Koordinator, Fasilitator, Implementor dan Akselerator (R. Nugroho, 2017).

### **Policy Creator**

Analisis stakeholder dalam pelaksanaan Program Padat Karya dapat digambarkan sebagai berikut;



Data hasil olahan penulis

Merupakan stakeholder yang memberikan kontribusi terhadap program dengan cara memberikan ide-ide pengembangan program dan juga yang berperan secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan yang nantinya akan diterapkan kepada masyarakat. Program berasal dari adanya suatu kebijakan, terdapat tiga stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam Program Padat Karya, diantaranya adalah Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Sosial Kota Surabaya, dan Kelurahan Medokan Semampir Kota Surabaya.

Aktualisasi dalam perumusan kebijakan dalam keterlibatan Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan adanya pengimplementasian visi dan misi walikota Surabaya dalam mengentaskan kemiskinan. Program ini, secara resmi dilaksanakan serempak pada awal bulan pada tahun 2023. Program ini merupakan program yang berorientasi dalam menanggulangi kemiskinan dengan memberikan lapangan pekerjaan baru dan juga memberikan pelatihan kerja dalam mengasah keterampilan dan kemampuan. Adapun juga Dinas Sosial Kota Surabaya yang berperan sebagai wadah untuk melakukan pendataan kepada masyarakat yang akan dijadikan target dalam Program Padat Karya. Sasaran dari program ini adalah warga kelurahan medokan semampir yang tergolong dalam Keluarga Miskin. Dinas Sosial berperan sebagai policy creator dalam menentukan kelayakan masyarakat ataupun ketidaklayakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

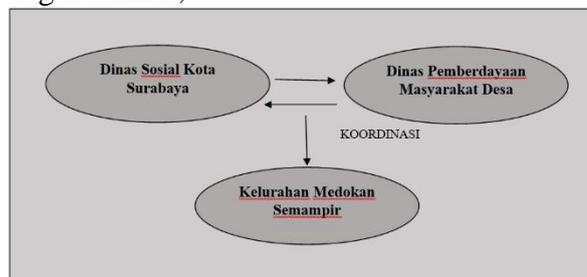
Keterlibatan Dinas Sosial Kota Surabaya berperan dalam melakukan filterisasi masyarakat yang mengajukan dirinya sebagai keluarga miskin. Dengan adanya kerja sama dengan stakeholder dari dinas sosial kota Surabaya, maka data yang diberikan dan data hasil lapangan dinyatakan akurat, karena hasil penentuan ketidaklayakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dilakukan melalui

kegiatan survey secara langsung terhadap pemohon ke alamat domisili. Dalam menentukan ketidaklayakan dalam pemenuhan kebutuhan (Gamis) dapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah gaji atau upah yang dihasilkan yang diimbangi dengan beban yang ditanggung sekaligus jumlah kekayaan atau asset yang dimiliki oleh keluarga pemohon bantuan. Sedangkan kelurahan medokan semampir berperan sebagai penentu kelayakan data keluarga miskin yang diusulkan oleh RT dan RW.

Pihak Kelurahan Medokan Semampir juga melakukan survey untuk diajukan kepada kecamatan bahwasanya keluarga tersebut layak mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah atau tidak. Apabila pihak Kelurahan tidak menyetujui bahwa keluarga pemohon atau Gamis untuk mendapatkan bantuan karena di survey dan ternyata warga tersebut masih layak dalam memenuhi kebutuhan jika dilihat dari kekayaan dan asset yang dimilikinya. Maka, keluarga tersebut sudah tidak perlu survey dari dinas sosial. Dinas sosial hanya menerima data yang diberikan oleh kecamatan. Oleh sebab itu, keluarga tersebut masih dikategorikan sebagai keluarga yang mampu. Selain itu, pihak kelurahan juga merupakan faktor penentu atas penyaluran dana atau dana kelurahan yang diperlukan dalam proses pelatihan kerja warga yang tercantum dalam data target. Proses pelatihan kerja yang digunakan untuk program padat karya berkaitan erat dengan dana kelurahan yang dianggarkan dan disetujui oleh lurah medokan semampir.

### **Koordinator**

Stakeholder yang berperan dan berhubungan dalam program Padat Karya dapat digambarkan sebagai berikut;



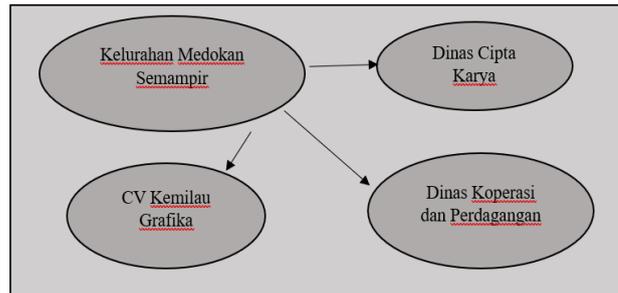
Data hasil olahan penulis

Merupakan stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan program padat karya dengan memberikan arahan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terdapat 3 stakeholder yang berperan sebagai koordinator Program Padat Karya, diantaranya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial Kota Surabaya, dan Kelurahan Medokan Semampir. Koordinator berperan sebagai pengarah sasaran untuk mengorganisir warga dalam proses pelatihan kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bekerja sama dengan mitra untuk mengkoordinasikan warga untuk ikut serta dalam pelatihan paving dan cor yang dinaungi oleh Dinas Cipta Karya. Sedangkan dinas Kooperasi dan perdagangan menghimbau warga untuk mengikuti pelatihan menjahit dan servis HP. Sedangkan CV Kemilau Grafika membutuhkan 1 orang kurir yang bisa mengantarkan barang ke tempat tujuan customer. Koordinator yang bersangkutan saling memberikan arahan dan bimbingan kepada warga terkait program padat

karya di Kelurahan Medokan Semampir.

### Fasilitator

Fasilitator merupakan stakeholder yang berperan untuk memfasilitasi dan memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh target atau kelompok sasaran. Terdapat 4 stakeholder yang berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program padat karya di Kelurahan Medokan Semampir, yaitu Pemerintah Kelurahan Medokan Semampir, Cipta Karya, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya, dan CV Kemilau Grafika.

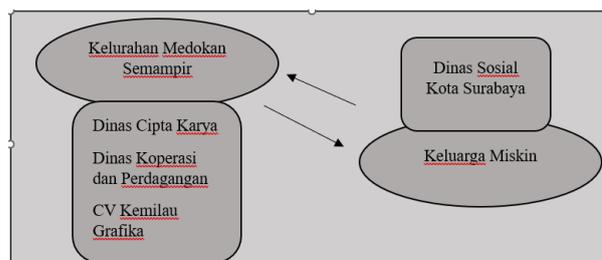


Data hasil olahan penulis

Adapun juga peran dari stakeholder dalam memberikan fasilitas baik berupa barang maupun jasa. Pemerintah Kelurahan Medokan Semampir memberikan Fasilitas finansial berupa dana kelurahan yang dialokasikan untuk pelatihan pastry cook. dsb. Sedangkan fasilitator lainnya memberikan fasilitas dalam penyediaan pelatihan yang dinaungi secara langsung di bawah passion dan bidangnya masing-masing. Contohnya Cipta Karya memberikan pelatihan pembuatan paving, dan beton. Sedangkan Dinas Koperasi dan perdagangan memebrikan pelatihan menjahit, mengobras, dsb. Adapun juga CV Gemilau memberikan pengalaman kerja sebagai kurir/pengantar paket. Dengan adanya pelatihan tersebut, fasilitataor berperan sebagai penyedia sekaligus pembimbing masyarakat untuk mengembangkan potensi sesuai dengan keahlian. Berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kasi Kesejahteraan Kelurahan Medokan Semampir bahwa 100% penduduk di Kelurahan Medokan Semampir sudah bekerja dari 1388 Kartu Keluarga yang akan dijadikan target.

### Implementor

Merupakan stakeholder yang berperan sebagai pelaksana adanya suatu kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Berikut gambaran hubungan stakeholder yang berperan sebagai implementator dari pelaksanaan Program Padat Karya;

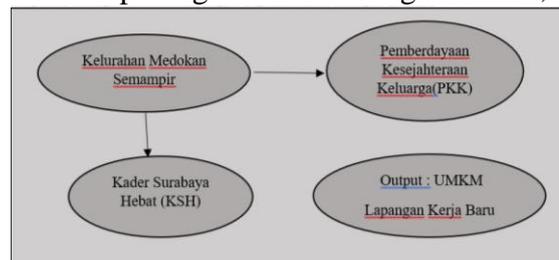


Data hasil olahan penulis

Terdapat 2 stakeholder yang berperan sebagai implementor diantaranya adalah Pemerintah Kelurahan Medokan Semampir dan Keluarga Miskin. Peran Kelurahan Medokan Semampir disini adalah sebagai pelaksana program dari rintisan Pemerintah Kota Surabaya yang diimplementasikan kepada warga yang berdomisili di Kelurahan Medokan Semampir. Pemerintah kelurahan hanya berperan dalam mengarahkan para masyarakat dan mencarikan lapangan kerja dengan menjalin kerja sama dengan mitra yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan Keluarga miskin disini berperan sebagai implementor inti karena pelaksanaan program padat karya sangat dipengaruhi oleh sumber daya dari Gamis (Keluarga Miskin) tersebut. Target keluarga miskin untuk mendapatkan pelatihan dan lapangan kerja baru harus saling berkaitan dengan rekomendasi Pemerintah Kelurahan. Oleh sebab itu, Sebagian besar warga banyak yang sudah mendapatkan pekerjaan dengan upah/gaji yang relative cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### **Akselerator**

Pada pelaksanaan program padat karya hubungan antar stakeholder yang berperan sebagai akselerator dapat digambarkan sebagai berikut;



Data hasil olahan penulis

Akselerator yaitu stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya (R. Nugroho, 2008). Stakeholder yang berperan sebagai akselerator adalah Kader Surabaya Hebat (KSH), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Pemerintah Kelurahan Medokan Semampir. Dengan adanya Kader Surabaya Hebat, dan PKK memberikan pengalaman bagi ibu rumah tangga dalam membuka lapangan kerja baru melalui rintisan UMKM. Terciptanya usaha yang mandiri, dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Kelompok-kelompok tersebut juga memberikan penguatan Sumber Daya Manusia seperti pelatihan memasak, dan pelatihan membuat pudding. Pembekalan tersebut mampu memberikan dampak yang riil bagi warga Kelurahan Medokan Semampir dalam menambah pengalaman dengan membuka usaha baru. Sedangkan pihak Kelurahan sebagai pendukung atas pelaksanaan program padat karya yang bisa mempercepat proses pelaksanaan program padat karya dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Medokan Semampir.

### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang telah disajikan tersebut, menjelaskan bahwa program padat karya di Kelurahan Medokan Semampir sudah berjalan dengan efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan data yang telah

diberikan oleh Kasi Kesejahteraan Kelurahan Medokan Semampir bahwasannya 100% masyarakat yang tercatat sebagai keluarga miskin (Gamis) sudah bekerja. Presentase jumlah gamis yang berpenghasilan diatas 4 juta rupiah sudah mencapai indeks 85%, sedangkan untuk yang 15% masih memiliki pendapatan di bawah 4 juta rupiah. Namun, dengan adanya program padat karya ini, pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berangsur mengalami penurunan yang awalnya mencapai target 355 KK mampu menurun dengan jumlah sisa 60 KK. Hal ini sangat dipengaruhi oleh stakeholder yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Program Padat Karya. Stakeholder yang diterapkan di Kelurahan Medokan Semampir berdasarkan analisis stakeholder menggunakan model Triple helix masih membutuhkan dukungan dari akademisi dan media massa. Saran dari penulis untuk memberikan kesempatan pada stakeholder yang berlatar belakang sebagai akademisi dan media masaa untuk mengembangkan ide-ide baru mengenai pelatihan dan perluasan lapangan kerja baru bagi keluarga yang dikategorikan miskin dan belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, dengan adanya bantuan dari akademisi dan media massa dapat memperluas relasi dalam bekerja sama dengan mitra sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif solusi dari hambatan yang telah disampaikan oleh penulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. (2013). *Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In Research design.*
- Dwi Ariyanto, E., & Marom Departemen Administrasi Publik, A. (n.d.). *ANALISIS PERAN STAKEHOLDER DALAM PROGRAM PILAH SAMPAH DI KELURAHAN MANGKANG KULON, KECAMATAN TUGU, KOTA SEMARANG.*
- Eko Handoyo. (2012). *Kebijakan Publik* (B. Mustrose, Ed.; 1st ed.). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Penerbit, "Widya Karya" Semarang Anggota IKAPI Nomor 117 / JTE / 2008.
- Ferezagia, D. V. (2018). The Influence of Diploma 3 Graduates on Unemployment in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 3(11). <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.2804>
- kemenkeu.go.id. (2023). *Angka Kemiskinan Semakin Turun, Kepala BKF: Sejalan Menguatnya Aktivitas Ekonomi.* 18 July 2023.
- K.Yin, R. (2003). *Applications of case study research. In Applied Social Research Methods Series* (Vol. 34).
- Nugroho, R. (2017). *Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik.* In *Jakarta: Elex Media Komputindo.* PT Elex Media Komputindo.
- Puspaningtyas, A. (2021). *Optimalisasi Sektor Unggulan Kota Surabaya dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.* *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1). <https://doi.org/10.33005/jdgv.v11i1.2484>
- surabaya.go.id. (2022). *PROGRAM PADAT KARYA SURABAYA JADI PERCONTOHAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.* Minggu, 23 Oktober 2022.

Utami, T., Riska, N., Afifah, A. P., Firmansyah, F., Albar, M. D., & Prasetyo, M. D. (2023). THE IMPACT OF UNEMPLOYMENT AND POVERTY ON ECONOMIC GROWTH IN THE CITY OF PALEMBANG. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 2(1). <https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i1.319>